

# PENGARUH PENYALURAN KREDIT BANK SYARIAH KEPADA USAHA KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN DI PROVINSI BANTEN

**Chairul Akmal**

Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email : akmalnanda@yahoo.com

## **Abstract**

*This paper examines the improvement of credit for Small Micro Middle Enterprises (UMKM) given by Sharia Banking in Banten. The method used in this research is survey method that relates to causal statistical descriptive approach. According to the type of data analysis, the research uses quantitative data. Therefore the design of this study is conclusive design that can be descriptive and associative design causal (causal) by which the number of respondents as many as 120 respondents. The result shows that the increasing credit for Small Micro Middle Enterprises (UMKM) given by Sharia Banking in Banten has significantly improved the income of Banten province. The policy has contributed 72,6% of the improvement and other factors contribute only about 27,4%. Key words: Sharia Banking, credit distribution, financial products, Small Micro Middle Enterprises (UMKM), income.*

## **Abstrak**

*Peningkatan posisi kredit untuk UKM dari perbankan syariah secara nasional maupun di wilayah Provinsi Banten maka pembatasan masalah dalam penelitian hanya mengkaji pengaruh penyaluran kredit perbankan syariah kepada Usaha Kecil dan Menengah terhadap pendapatan di Provinsi Banten sehingga ruang lingkup penelitian adalah Usaha Kecil dan Menengah yang mendapat penyaluran kredit dari lembaga keuangan perbankan syariah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian survai dengan tingkat eksplanasinya penelitian bersifat penelitian asosiatif/hubungan dengan bentuk hubungan kausal pendekatan*

deskriptif statistik. Menurut jenis data analisis penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Sehingga desain penelitian ini merupakan desain konklusif. Desain konklusif dapat berupa desain deskriptif dan desain asosiatif kausal (sebab akibat) dengan jumlah responden sebanyak 120 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran kredit perbankan syariah kepada Usaha Kecil dan Menengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Provinsi Banten dengan kontribusi pengaruh 72,6% dan sisanya 27,4 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis dari persamaan regresi sederhana secara parsial antar variabel penyaluran kredit UKM terhadap pendapatan Provinsi Banten menunjukkan hasil uji t terhadap koefisien regresi  $b_i$  (penyaluran kredit UKM)  $X \rightarrow Y$  menunjukkan  $t_{b1} = 17,681$  (Sig. = 0,000). Ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Oleh karena itu koefisien regresi variabel penyaluran kredit UKM adalah signifikan. Dengan demikian, penyaluran kredit UKM berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Provinsi Banten ditunjukkan oleh nilai probabilitas P-value  $0,000 < \alpha 0,05$ . Dari persamaan regresi berganda tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut : Apabila terdapat peningkatan 1 (satu) satuan unit skor pada penyaluran kredit UKM akan meningkatkan Pendapatan Provinsi Banten sebesar 0,517 satuan unit dan apabila penyaluran kredit UKM dianggap tidak ada atau sama dengan nol maka Pendapatan Provinsi Banten sebesar 3,212 satuan unit skor. Pengaruh penyaluran kredit UKM terhadap Pendapatan Provinsi Banten ditunjukkan oleh koefisien regresi  $b_i$  (Penyaluran Kredit UKM) = 0,517 dan koefisien regresi terstandarkan (beta standardized coefficient) menunjukkan bahwa pengaruh penyaluran kredit UKM terhadap Pendapatan Provinsi Banten adalah positif. Dengan demikian penyaluran kredit perbankan syariah kepada UKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan di Provinsi Banten.

**Kata Kunci :** Perbankan Syariah, Penyaluran Kredit, Produk Penyaluran Dana (Financing), Usaha Kecil dan Menengah (UKM), Pendapatan

## A. Pendahuluan

Perbankan syariah saat ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan mulai tahun 2008 jumlah bank umum syariah yang hanya berjumlah 5 bank dengan 581 kantor pada tahun 2013 meningkat dan sudah mencapai 11 bank umum syariah dengan 1.780 kantor. Sedangkan unit usaha syariah justru mengalami penurunan namun jumlah kantornya bertambah mulai tahun 2008 yang berjumlah 27 bank dengan jumlah kantor sebanyak 241 di tahun 2013 hanya mencapai 24 bank dengan 521 kantor. Selain itu badan pembiayaan rakyat syariah pada tahun 2008 berjumlah 131 bank dengan 202 kantor mengalami peningkatan di tahun 2013 sebanyak 158 bank dengan 398 kantor yang secara terinci dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini :

**Tabel 1.**  
**Jaringan Kantor Perbankan Syariah Indonesia**  
**Periode Tahun 2008-2013**

Uraian	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bank Umum Syariah -Jumlah Bank -Jumlah Kantor	5581	6711	111.215	111.401	111.745	111.780
Unit Usaha Syariah -Jumlah Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS -Jumlah Kantor	27241	25287	23262	24336	24517	24521
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah -Jumlah Bank -Jumlah Kantor	131202	138225	150286	155364	156401	158398

Sumber : Bank Indonesia (2013)<sup>1</sup>

Proses pemulihan perekonomian global sudah mulai dirasakan pada akhir tahun 2012, walaupun di beberapa bagian dunia masih ada yang justru baru memasuki krisis keuangan dan perekonomian. Terlebih untuk kinerja perekonomian Indonesia dengan tingkat konsumsi domestik relatif tinggi dan kelas menengah yang meningkat serta ditunjang oleh kondisi makro ekonomi yang relatif terjaga dengan baik, merupakan beberapa

faktor penyebab perekonomian nasional tidak terlalu terpengaruh oleh krisis perekonomian global. Begitu pula dengan perbankan syariah nasional, relatif tidak begitu signifikan mengalami dampak krisis ekonomi global pada awal tahun 2012 sejalan dengan fokus perbankan Indonesia yang lebih tertuju kepada pasar domestik yang masih besar, serta potensi pangsa perbankan syariah yang masih tinggi di Indonesia, dengan pangsa pasar sampai dengan akhir tahun 2012 telah mendekati 5%.

Pesatnya perkembangan perbankan syariah tidak terlepas dari fungsi dari perbankan syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.<sup>2</sup>

Perkembangan penyaluran kredit perbankan syariah mengikuti perkembangan penyaluran kredit perbankan Indonesia yang dapat dilihat pada Tabel 2. sebagai berikut :

**Tabel 2.**  
**Penyaluran Kredit Perbankan Indonesia**  
**Periode Tahun 2008-2013**  
**Dalam Triliun Rupiah**

No.	Tahun	Penyaluran Kredit Perbankan Indonesia
1.	2008	1.313,9
2.	2009	1.446,8
3.	2010	1.738,6
4.	2011	2.223,7
5.	2012	2.738,1
6.	2013	3.382,8

**Sumber : Bank Indonesia (2013)<sup>3</sup>**

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penyaluran kredit perbankan terus meningkat dari Rp. 1.313,9 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp. 3.382,8 triliun pada tahun 2013, meskipun

pertumbuhannya sempat menurun terkait dengan krisis energi dan keuangan internasional tahun 2008/2009. Penyaluran dana kredit perbankan menurut sektor ekonomi mengalami peningkatan yang berarti pada hampir semua sektor. Dalam lima tahun terakhir (2008–2012) penyaluran kredit mengalami lonjakan yang cukup besar. Penyaluran kredit perbankan yang terbanyak dari sektor perdagangan, hotel dan restoran diikuti oleh sektor industri pengolahan.<sup>4</sup>

Selanjutnya perkembangan posisi kredit mikro menurut pembiayaan perbankan Indonesia yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah dan non usaha kecil dan menengah yang dapat dilihat pada Tabel 3. sebagai berikut :

**Tabel 3.**  
**Posisi Kredit Mikro**  
**Menurut Golongan Pembiayaan Indonesia**  
**Periode Tahun 2008-2013 dalam Milyar Rupiah**

Golongan Pembiayaan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
UKM	27,063	35,799	52,270	71,810	90,860	92,672
Non UKM	11,132	11,087	15,611	30,845	56,645	57,000

**Sumber : Bank Indonesia (2013)<sup>5</sup>**

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa posisi kredit mikro menurut pembiayaan perbankan Indonesia yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar Rp. 27,063 milyar terus meningkat hingga tahun 2013 mencapai Rp. 92,672 milyar. Sedangkan posisi kredit mikro menurut pembiayaan perbankan Indonesia yang diberikan kepada non usaha kecil dan menengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar Rp. 11,132 milyar terus meningkat hingga tahun 2013 mencapai Rp. 57,000 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan (*financing*) dari perbankan syariah Indonesia untuk usaha kecil dan menengah lebih banyak dibandingkan dengan non usaha kecil dan menengah. Seiring dengan itu perkembangan posisi kredit mikro menurut pembiayaan perbankan Provinsi Banten yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah dan non usaha kecil dan menengah yang dapat dilihat pada Tabel 4. sebagai berikut :

**Tabel 4.**  
**Posisi Kredit Mikro Menurut Golongan Pembiayaan**  
**Provinsi Banten Periode Tahun 2008-2013**  
**dalam Juta Rupiah**

Golongan Pembiayaan	2008	2009	2010	2011	2012	2013
UKM	1.475.946	1.539.518	2.281.565	1.684.000	1.941.000	2.348.000
Non UKM	945.201	895.758	756.690	1.102.000	2.291.000	2.422.000

**Sumber : Badan Pusat Statistik (2013)<sup>6</sup>**

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa posisi kredit mikro menurut pembiayaan perbankan Indonesia yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar Rp. 1.475.946 juta terus meningkat hingga tahun 2013 mencapai Rp. 2.348.000 juta. Sedangkan posisi kredit mikro menurut pembiayaan perbankan Indonesia yang diberikan kepada non usaha kecil dan menengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar Rp. 945.201 juta terus meningkat hingga tahun 2013 mencapai Rp. 2.422.000 juta. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan (*financing*) dari perbankan syariah Provinsi Banten untuk usaha kecil dan menengah juga lebih banyak dibandingkan dengan non usaha kecil dan menengah.

Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada masa periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang berfluktuatif. Pertumbuhan pendapatan tertinggi terjadi pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 sebesar 33,42%. Pertumbuhan pendapatan terendah terjadi pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 sebesar 5,54%. Pencapaian pendapatan daerah didorong oleh realisasi Pajak Asli Daerah (PAD). Penyerapan belanja langsung tahun ini baru mencapai 70%, masih lebih tinggi dari tingkat penyerapan di tahun 2012. Penerapan sistem pencairan anggaran yang baru tidak menghalangi pemerintah daerah dalam perealisasi program yang telah dicanangkan. Hal ini mengindikasikan membaiknya kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan.

Secara terinci pendapatan daerah provinsi Banten periode tahun 2008-2013 disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.**  
**Pendapatan Daerah Provinsi Banten**  
**Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2013**

No.	Tahun	Pendapatan (Milyar Rupiah)	Growth (%)
1.	2008	2.028,87	-
2.	2009	2.220,91	9,47
3.	2010	2.377,31	7,04
4.	2011	2.924,69	23,02
5.	2012	3.902,07	33,42
6.	2013	4.118,29	5,54

**Sumber : DPPKD Provinsi Banten (2013)**

Jika dilihat dari pertumbuhan PDRB menurut harga konstan Provinsi Banten pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi juga terjadi pada periode tahun 2011/2012 sebesar 6,43% sedang pertumbuhan terendah terjadi pada periode tahun 2008/2009 sebesar 4,71%. Ekonomi Provinsi Banten triwulan IV-2013 tercatat sebesar 5,84% (yoy), secara agregat selama tahun 2013 pertumbuhan ekonomi menjadi 5,86% (yoy). Meningkatnya konsumsi rumah tangga dan pemerintah serta realisasi investasi yang lebih tinggi mendorong tingkat pertumbuhan dari sisi permintaan. Sementara itu dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dengan kecepatan yang lebih tinggi pada triwulan laporan didorong oleh sektor pertanian, sektor konstruksi dan sektor jasa-jasa. Namun secara agregat selama tahun 2013 pertumbuhan ekonomi menjadi 5,86% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten di tahun 2012. Dari sisi permintaan, terlihat bahwa terjadi perlambatan di investasi. Dari sisi penawaran, perlambatan terjadi di sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor listrik, gas, dan air.

Secara terinci Produk Domestik Regional Bruto menurut harga konstan Provinsi Banten periode tahun 2000-2012 disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 6.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Menurut Harga Konstan**  
**Provinsi Banten Periode Tahun 2008 – 2013**  
**Dalam Milyar Rupiah**

No.	Tahun	PDRB Provinsi Banten	Growth
1.	2008	79.701	-
2.	2009	83.454	4,71
3.	2010	88.526	6,08
4.	2011	94.222	6,43
5.	2012	100.000	6,13
6.	2013	105.860	5,86

Sumber : Badan Pusat Statistik (2008 – 2013)<sup>8</sup>

Menurut Chapra<sup>9</sup> kriteria utama untuk menentukan keefektifan perbankan Islam bukan hanya sejauh mana tingkat eliminasi bunga dari operasinya dan keuntungan yang mereka dapatkan, tetapi juga sejauh mana mereka membanu mencapai tujuan-tujuan sosioekonomi masyarakat Islam. Beberapa di antaranya seperti mobilisasi tabungan, mendorong keusahaan berbasis luas, efisiensi dalam penggunaan tabungan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat muslim, mengurangi konsentrasi kekayaan dan kekuasaan dan membantu stabilitas finansial. Perbankan Islam tidak hanya sekedar bebas bunga, tetapi juga berorientasi kepada kesejahteraan dengan meningkatkan pendapatan. Dengan demikian penyaluran kredit bank syariah kepada usaha kecil dan menengah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan di Provinsi Banten dan sesuai dengan sasaran dan fungsinya untuk mensejahterahkan masyarakat di Provinsi Banten.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perbankan Syariah**

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Menurut Al Arif<sup>10</sup> bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha



pekoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.

Dengan demikian, dapat ditarik definisi umum bahwa Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (*intermediary*) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah menurut Soemitra<sup>11</sup> yaitu :

- a. Penghapusan riba ;
- b. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam ;
- c. Bank Syariah bersifat universal ;
- d. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi pada penyertaan modal karena bank komersial syariah menerapkan profit *loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis atau industri ;
- e. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha ;
- f. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi likuiditasnya dengan memaafkan instrument pasar uang antarbank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah.

## 2. Teori Penyaluran Kredit

Kredit adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan, termasuk pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan NPA (*Note Purchase Agreement*), dan pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (*factoring*).<sup>12</sup> Dari sisi Aktiva, penggunaan dana kredit secara umum portofolionya berkisar 70% dari total volume usaha bank. Penyaluran kredit tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja, investasi dan keperluan kredit konsumtif nasabah.<sup>13</sup>

Kredit menurut Sholihin,<sup>14</sup> adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kuncoro dan Suhardjono<sup>15</sup> menyatakan bahwa dana yang dihimpun oleh bank harus disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Hal ini dilakukan karena fungsi bank adalah sebagai lembaga perantara (*intermediare*) antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, dan keuntungan bank diperoleh dari selisih antara harga jual dan harga beli dana tersebut setelah dikurangi dengan biaya operasional. Dengan demikian bank harus mampu menempatkan dana tersebut dalam bentuk penempatan yang paling menguntungkan. Pada umumnya penempatan dana yang paling menguntungkan adalah dalam bentuk kredit, namun demikian risiko yang dihadapi oleh bank dalam penempatan dana tersebut juga besar. Oleh karena itu bank harus berhati-hati dalam menempatkan dana dalam bentuk kredit.

### 3. Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Pembiayaan atau *financing* menurut Al Arif,<sup>16</sup> ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Menurut Umam,<sup>17</sup> pembiayaan atau pinjaman (*loan*) yang diberikan oleh suatu bank, sebagian danannya berasal dari dana simpanan para nasabahnya. Nasabah tersebut terdiri atas masyarakat umum, perusahaan swasta, koperasi, perusahaan milik negara/pemerintah daerah, dinas-dinas, jawatan-jawatan atau instansi pemerintah. Disamping itu, dana pembiayaan bisa pula berasal dari dana lain, seperti pinjaman dari Bank Indonesia, modal para pemilik saham atau obligasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa<sup>18</sup> :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.

- e. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

#### 4. Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Perusahaan kecil dapat didefinisikan secara kualitatif dan kuantitatif. Dari sisi kualitatif, perusahaan kecil dicirikan oleh : (1) dimiliki secara individual; (2) terkontrol ketat oleh manajer yang bertanggung jawab membuat keputusan-keputusan utama; (3) manajer-pemilik menyumbang hampir semua kapital; (4) operasinya berorientasi lokal, meskipun pasarnya mungkin tidak. Adapun kriteria kuantitatifnya, perusahaan manufaktur memperkerjakan kurang dari 100 orang, dan dalam perusahaan non-manufaktur kurang dari 20 orang.<sup>19</sup>

Menurut Chapra,<sup>20</sup> perusahaan-perusahaan berskala besar yang padat modal tidak dapat menyediakan peluang pekerjaan bagi angkatan kerja. Karena, negara-negara muslim mengalami surplus tenaga kerja, kelangkaan modal, dan devisa serta kekurangan infrastruktur pendidikan bagi pelatihan teknologi kompleks, maka patutlah mereka melakukan ekspansi peluang-peluang wirausaha dengan mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM). Al-Banna<sup>21</sup> memberikan perhatian kepada industri-industri rumah tangga dalam pembahasannya mengenai reformasi ekonomi menurut Islam. Beliau menekankan bahwa hal ini akan membantu menyediakan lapangan pekerjaan produktif bagi semua anggota keluarga miskin sehingga mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah<sup>22</sup> pada Bab II, Pasal 3 menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Berdasarkan uraian di atas usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil yang ditentukan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008.

## 5. Pendapatan

Pendapatan merupakan semua penerimaan baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.<sup>23</sup> Samuelson dan Nordhaus,<sup>24</sup> menyatakan bahwa pendapatan mengarah kepada penerimaan keseluruhan atau uang kontan yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Pendapatan terdiri dari pendapatan tenaga kerja, pendapatan properti dan pembayaran transfer pemerintah. Pendapatan mengacu kepada aliran upah, pembayaran bunga, keuntungan saham dan hal-hal lain mengenai pertambahan nilai selama periode waktu tertentu. Pendapatan pribadi sama dengan pendapatan pasar ditambah pembayaran transfer. Sebagian besar pendapatan pasar datang dari upah dan gaji; kaum minoritas kecil yang kaya memperoleh pendapatan pasar mereka dari penghasilan atas properti.

Menurut Reeve,<sup>25</sup> perusahaan mendapatkan sejumlah uang dengan menjual barang atau jasa ke pelanggannya. Jumlah tersebut disebut pendapatan (*revenue*). Istilah khusus dapat digunakan untuk menjelaskan jenis pendapatan tertentu, seperti penjualan (*sales*) untuk penjualan barang. Pendapatan yang diperoleh dari menyediakan jasa dapat disebut pendapatan honor atau pendapatan jasa (*fees earned*). Contoh lain meliputi pendapatan sewa (*rent revenue*) yaitu uang yang diterima dari menyewakan tempat dan pendapatan bunga (*interest revenue*) yaitu uang yang diperoleh dari bunga tabungan di bank atau meminjamkan uang kepada pihak lain.

## C. Metodologi Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Untuk metode penelitian ini menggunakan penelitian survai di mana menurut Kerlinger<sup>26</sup> adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Penelitian menurut tingkat eksplanasinya penelitian bersifat penelitian asosiatif/hubungan dengan bentuk hubungan kausal pendekatan

deskriptif statistik. Menurut jenis data analisis penelitian ini menggunakan data kuantitatif.

Sehingga desain penelitian ini merupakan desain konklusif. Menurut Maholtra<sup>27</sup> desain konklusif merupakan desain penelitian bertujuan menguji hipotesis dengan karakteristik informasi yang didefinisikan secara jelas dan proses riset terstruktur. Selanjutnya metode analisis adalah kuantitatif dengan temuan ada pada kesimpulan serta hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Desain konklusif dapat berupa desain deskriptif dan desain asosiatif kausal (sebab akibat).

## 2. Variabel Penelitian

Variabel independen dalam penelitian adalah Penyaluran Kredit UKM (X). Variabel dependen sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.<sup>28</sup> Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Provinsi Banten (Y).

## D. Hasil Analisis Dan Pembahasan

Hasil penelitian mengenai penyaluran kredit perbankan syariah kepada Usaha Kecil dan Menengah terhadap pendapatan di Provinsi Banten menemukan bahwa :

### 1. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah saat ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan mulai tahun 2008 jumlah bank umum syariah yang hanya berjumlah 5 bank dengan 581 kantor pada tahun 2013 meningkat dan sudah mencapai 11 bank umum syariah dengan 1.780 kantor. Sedangkan unit usaha syariah justru mengalami penurunan namun jumlah kantornya bertambah mulai tahun 2008 yang berjumlah 27 bank dengan jumlah kantor sebanyak 241 di tahun 2013 hanya mencapai 24 bank dengan dengan 521 kantor. Selain itu badan pembiayaan rakyat syariah pada tahun 2008 berjumlah 131 bank dengan 202 kantor mengalami peningkatan di tahun 2013 sebanyak 158 bank dengan 398 kantor. Sepanjang tahun 2012, kinerja industri perbankan syariah nasional yang masih didominasi struktur asetnya sekitar  $\pm 98\%$  oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha

Syariah (UUS) relatif cukup baik, tercermin dari : (i) fungsi intermediasi berada pada tingkat yang optimal dengan rata-rata FDR sebesar 97,16%; (ii) tingkat kecukupan modal (CAR) masih jauh di atas minimum 8% dengan rata-rata CAR sebesar  $\pm 15,17\%$ ; dan (iii) tingkat pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing/NPF*) masih di bawah 5% dengan rata-rata sebesar 2,72% dan bahkan untuk posisi Desember 2012 mencapai 2,22%.

2. Perkembangan penyaluran kredit perbankan Indonesia

Penyaluran kredit perbankan terus meningkat dari Rp. 1.313,9 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp. 3.382,8 triliun pada tahun 2013, meskipun pertumbuhannya sempat menurun terkait dengan krisis energi dan keuangan internasional tahun 2008/2009. Penyaluran dana kredit perbankan menurut sektor ekonomi mengalami peningkatan yang berarti pada hampir semua sektor. Dalam lima tahun terakhir (2008–2012) penyaluran kredit mengalami lonjakan yang cukup besar. Penyaluran kredit perbankan yang terbanyak dari sektor perdagangan, hotel dan restoran diikuti oleh sektor industri pengolahan.

3. Perkembangan penyaluran kredit perbankan syariah kepada Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia.

Perkembangan penyaluran kredit bank syariah bahwa posisi kredit mikro menurut pembiayaan perbankan Indonesia yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar Rp. 27,063 milyar terus meningkat hingga tahun 2013 mencapai Rp. 92,672 milyar. Sedangkan posisi kredit mikro menurut pembiayaan perbankan Indonesia yang diberikan kepada non usaha kecil dan menengah terus mengalami peningkatan dari tahun 2008 sebesar Rp. 11,132 milyar terus meningkat hingga tahun 2013 mencapai Rp. 57,000 milyar. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan (*financing*) dari perbankan syariah Indonesia untuk usaha kecil dan menengah lebih banyak dibandingkan dengan non usaha kecil dan menengah.

4. Perkembangan penyaluran kredit bank umum kepada Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Banten.

Perkembangan kredit yang disalurkan bank umum di wilayah Provinsi Banten kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada periode laporan menunjukkan pertumbuhan

yaitu sebesar 19,06 % (yoy) dengan nilai mencapai Ro. 73.63 triliun. Pangsa kredit UMKM ini mencapai 18,79% dari total kredit yang disalurkan. Dilihat berdasarkan jenis penggunaannya, penyaluran kredit UMKM sebanyak 76,08% digunakan untuk modal kerja atau senilai dengan Rp. 10,53 triliun dan 21,11% untuk investasi atau mencapai Rp. 2,92 triliun. Sementara itu, berdasarkan sektor ekonomi, pangsa kredit UMKM terbesar adalah yang disalurkan ke sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan pangsa 54,81% atau mencapai nilai Rp. 5,79 triliun, diikuti sektor industri dengan pangsa 11,89% dengan nilai Rp. 1.6 triliun.

5. Perkembangan penyaluran atau pembiayaan kredit perbankan syariah kepada Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Banten. Kinerja perbankan syariah selama periode laporan menunjukkan perkembangan yang baik, sebagaimana tercermin dari indikator seperti aset, DPK, pembiayaan dan risiko kredit. Total aset perbankan syariah di wilayah Provinsi Banten mengalami pertumbuhan sebesar 31.89% atau mencapai nilai Rp. 7,13 triliun. Dana Pihak Ketiga yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah mengalami pertumbuhan namun lebih kecil dari triwulan sebelumnya yaitu dari 21,9% menjadi 17,6% dengan nominal sebesar Rp. 5,11 triliun. Demikian juga dengan perkembangan pembiayaan yang tumbuh positif namun lebih kecil dari periode sebelumnya yakni dari 38,02% menjadi 35,23% atau mencapai nilai Rp. 4.93 triliun. Sementara itu, kondisi kualitas pembiayaan pada periode laporan tetap stabil pada level 1,51%. Meskipun terus menunjukkan perkembangan yang baik, namun kinerja perbankan syariah terhadap total perbankan di wilayah Provinsi Banten masih relatif kecil, sebagaimana tercermin dari pangsa beberapa indikator seperti aset, DPK dan pembiayaan. Sampai akhir periode laporan, pangsa aset perbankan syariah di wilayah Provinsi Banten baru mencapai 5,89% dari total aset perbankan di wilayah Provinsi Banten, demikian juga dengan pangsa penghimpunan dana pihak ketiga perbankan syariah hanya sebesar 5,04%. Sementara itu pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di wilayah Provinsi Banten sebesar 6,7% dari total pembiayaan perbankan di wilayah Provinsi Banten.
6. Perkembangan pendapatan di Provinsi Banten

Pendapatan Daerah Provinsi Banten pada masa periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang berfluktuatif. Pertumbuhan pendapatan tertinggi terjadi pada periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 sebesar 33,42%. Pertumbuhan pendapatan terendah terjadi pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 sebesar 5,54%. Pencapaian pendapatan daerah didorong oleh realisasi Pajak Asli Daerah (PAD). Penyerapan belanja langsung tahun ini baru mencapai 70%, masih lebih tinggi dari tingkat penyerapan di tahun 2012. Penerapan sistem pencairan anggaran yang baru tidak menghalangi pemerintah daerah dalam perealisasi program yang telah dicanangkan. Hal ini mengindikasikan membaiknya kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan program-program yang telah direncanakan. Jika dilihat dari pertumbuhan PDRB menurut harga konstan Provinsi Banten pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan tertinggi juga terjadi pada periode tahun 2011/2012 sebesar 6,43% sedang pertumbuhan terendah terjadi pada periode tahun 2008/2009 sebesar 4,71%. Ekonomi Provinsi Banten triwulan IV-2013 tercatat sebesar 5,84% (yoy), secara agregat selama tahun 2013 pertumbuhan ekonomi menjadi 5,86% (yoy). Meningkatnya konsumsi rumah tangga dan pemerintah serta realisasi investasi yang lebih tinggi mendorong tingkat pertumbuhan dari sisi permintaan. Sementara itu dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dengan kecepatan yang lebih tinggi pada triwulan laporan didorong oleh sektor pertanian, sektor konstruksi dan sektor jasa-jasa. Namun secara agregat selama tahun 2013 pertumbuhan ekonomi menjadi 5,86% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten di tahun 2012. Dari sisi permintaan, terlihat bahwa terjadi perlambatan di investasi. Dari sisi penawaran, perlambatan terjadi di sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor listrik, gas, dan air.

7. Penyaluran kredit perbankan syariah kepada UKM dalam meningkatkan pendapatan Provinsi Banten.

Hasil penelitian secara deskriptif terhadap variabel penelitian yang didapatkan dari kuesioner atau angket pernyataan yang disebarakan kepada responden penelitian menunjukkan bahwa



untuk variabel penyaluran kredit kepada Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan nilai skor rata-rata yang paling tinggi adalah indikator *rahn* di mana penahanan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya yaitu 3,80. Hal ini berarti bahwa *rahn* dalam penyaluran atau pembiayaan kredit UKM dari perbankan syariah dalam bentuk *rahn* lebih banyak diminati daripada yang lainnya. Sedangkan nilai skor rata-rata yang paling rendah adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan yaitu 3,25. Untuk variabel pendapatan Provinsi Banten menunjukkan nilai skor rata-rata yang paling tinggi adalah adanya penyaluran kredit dari perbankan syariah membuat perusahaan dapat meningkatkan pendapatan bonus tenaga kerja UKM Provinsi Banten yaitu 3,76. Hal ini berarti bahwa peningkatan penyaluran kredit UKM dapat meningkatkan pendapatan bonus bagi tenaga kerja UKM. Sedangkan nilai skor rata-rata yang paling rendah adalah Adanya penyaluran kredit dari perbankan syariah membuat perusahaan dapat meningkatkan pendapatan impor UKM Provinsi Banten yaitu 3,50.

Hubungan penyaluran kredit UKM terhadap pendapatan provinsi Banten adalah kuat yaitu dengan koefisien korelasi sebesar  $R = 0,852$ . Ini dapat diartikan bahwa penyaluran kredit UKM memiliki hubungan yang kuat terhadap pendapatan provinsi Banten. Adapun pengaruh penyaluran kredit UKM terhadap pendapatan provinsi Banten dapat dijelaskan oleh koefisien determinasi yaitu  $R^2 = 0,726$  atau 72,6%, sedangkan sisanya sebanyak 27,4% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Hasil pengujian hipotesis penelitian berdasarkan persamaan regresi sederhana secara parsial antar variabel penyaluran kredit UKM terhadap pendapatan Provinsi Banten menunjukkan hasil uji  $t$  terhadap koefisien regresi  $b_1$  (penyaluran kredit UKM)  $X \rightarrow Y$  menunjukkan  $t_{b_1} = 17,681$  (Sig. = 0,000). Ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Oleh karena itu koefisien regresi variabel penyaluran kredit UKM adalah signifikan. Dengan demikian, penyaluran kredit UKM berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Provinsi Banten ditunjukkan oleh nilai probabilitas  $P\text{-value } 0,000 < \alpha 0,05$ . Hasil persamaan regresi sederhana pengaruh penyaluran

kredit UKM terhadap pendapatan Provinsi Banten dapat dinyatakan dalam persamaan matematik yaitu :  $Y = 3,212 + 0,517X$  Dari persamaan regresi berganda tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut : Apabila terdapat peningkatan 1 (satu) satuan unit skor pada penyaluran kredit UKM akan meningkatkan Pendapatan Provinsi Banten sebesar 0,517 satuan unit dan apabila penyaluran kredit UKM dianggap tidak ada atau sama dengan nol maka Pendapatan Provinsi Banten sebesar 3,212 satuan unit skor. Pengaruh penyaluran kredit UKM terhadap Pendapatan Provinsi Banten ditunjukkan oleh koefisien regresi  $b_i$  (Penyaluran Kredit UKM) = 0,517 dan koefisien regresi terstandarkan (*beta standardized coefficient*) menunjukkan bahwa pengaruh penyaluran kredit UKM terhadap Pendapatan Provinsi Banten adalah positif.

#### **E. Kesimpulan Dan Saran**

1. Kesimpulan dalam penelitian ini membuktikan bahwa penyaluran kredit perbankan syariah kepada Usaha Kecil dan Menengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan Provinsi Banten dengan kontribusi pengaruh 72,6% dan sisanya 27,4 dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis dari persamaan regresi sederhana secara parsial antar variabel penyaluran kredit UKM terhadap pendapatan Provinsi Banten menunjukkan hasil uji t terhadap koefisien regresi  $b_i$  (penyaluran kredit UKM)  $X \rightarrow Y$  menunjukkan  $t_{b1} = 17,681$  (Sig. = 0,000). Ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Oleh karena itu koefisien regresi variabel penyaluran kredit UKM adalah signifikan. Dengan demikian, penyaluran kredit UKM berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan Provinsi Banten ditunjukkan oleh nilai probabilitas *P-value*  $0,000 < \alpha 0,05$ . Dari persamaan regresi berganda tersebut di atas dapat diuraikan sebagai berikut: Apabila terdapat peningkatan 1 (satu) satuan unit skor pada penyaluran kredit UKM akan meningkatkan Pendapatan Provinsi Banten sebesar 0,517 satuan unit dan apabila penyaluran kredit UKM dianggap tidak ada atau sama dengan nol maka Pendapatan Provinsi Banten sebesar 3,212 satuan unit skor. Pengaruh penyaluran kredit UKM terhadap Pendapatan Provinsi Banten ditunjukkan oleh koefisien regresi  $b_i$  (Penyaluran Kredit UKM) = 0,517 dan koefisien regresi

terstandarkan (*beta standardized coefficient*) menunjukkan bahwa pengaruh penyaluran kredit UKM terhadap Pendapatan Provinsi Banten adalah positif.

2. Saran-saran yang diperlukan dalam pengembangan dari hasil kesimpulan penelitian adalah sebagai berikut :
  - a. Untuk perbankan syariah sebaiknya meningkatkan penyaluran kredit kepada UKM yang dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah melalui akselerasi produk perbankan syariah. Keberagaman produk dan jasa sebagai ciri khas bank syariah. Bank syariah perlu terus melakukan inovasi produk dan dapat mengeksplorasi kekayaan skema keuangan yang variatif dan sekaligus bisa menunjukkan perbedaan dengan perbankan konvensional.
  - b. Untuk meningkatkan pendapatan suatu daerah, sebaiknya pemerintah berperan serta dalam memaksimalkan sosialisasi perbankan syariah terhadap masyarakat melalui masyarakat yang memiliki pengetahuan serta pemahaman yang baik mengenai perbankan syariah dan ekonomi Indonesia, maka masyarakat dapat memanfaatkan produk-produk perbankan syariah dalam meningkatkan usaha dan pendapatannya sehingga berpengaruh terhadap pendapatan suatu daerah.
  - c. Pihak pemerintah disarankan untuk melakukan kajian sistem keuangan, sistem perbankan, dan sistem pengawasan yang lebih mendalam dan intensif seperti tentang sektor-sektor usaha yang *feasible* dan layak untuk dibiayai seperti Usaha Kecil dan Menengah dengan kendali risiko yang akurat melalui implementasi *risk management system* yang *up to dated*.

### Catatan akhir :

---

<sup>1</sup> Bank Indonesia. (2013). *Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics)*. Jakarta : Bank Indonesia.

<sup>2</sup> Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group.

<sup>3</sup> Bank Indonesia. (2013). *Ibid.* Hal 27-28.

<sup>4</sup> Bank Indonesia. (2013). *Ibid.* Hal 27-28.

<sup>5</sup> Bank Indonesia. (2013). *Ibid.* Hal 27-28.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik. (2013). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten*.

- <sup>7</sup> Bank Indonesia. (2013). *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Banten*. Banten
- <sup>8</sup> Badan Pusat Statistik. (2013). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten*
- <sup>9</sup> Chapra. (2003). *Op Cit.* Hal 124.
- <sup>10</sup> Al-Arif, M. Nur Rianto. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung : CV Alfabeta
- <sup>11</sup> Soemitra, Andir. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media
- <sup>12</sup> Siamat, Dahlan. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan. Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Edisi Kelima. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- <sup>13</sup> Siamat, Dahlan. (2005). *Ibid.* Hal. 283.
- <sup>14</sup> Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- <sup>15</sup> Kuncoro, M. dan Suhardjono. (2011). *Manajemen Perbankan. Teori dan Aplikasi*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta : BPFE.
- <sup>16</sup> Al-Arif, M. Nur Rianto. (2012). *Op Cit.* Hal 42.
- <sup>17</sup> Umam, Khaerul. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung : CV. Pustaka Setia
- <sup>18</sup> Al-Arif, M. Nur Rianto. (2012). *Op Cit.* Hal 42
- <sup>19</sup> Hakim, Abdul. (2002). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Ekonisia.
- <sup>20</sup> Chapra, Umer M. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Cetakan Pertama. Penerjemah : Ikhwan Abidin B. Jakarta : Gema Insani Press
- <sup>21</sup> Chapra, Umer M. (2000). *Ibid.* Hal. 313.
- <sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2008. *Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
- <sup>23</sup> Sholihin, A. I. (2010). *Op Cit.* Hal 621.
- <sup>24</sup> Reeve, J.M., et. al. (2013). *Pengantar Akuntansi. Adaptasi Indonesia*. Buku I. Penerjemah : Damayanti Dian. Jakarta : Salemba Empat
- <sup>25</sup> Reeve, J.M., et. al. (2013). *Op Cit.* Hal 18
- <sup>26</sup> Sugiyono, (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Cetakan Ketiga. Bandung : Alfabeta.
- <sup>27</sup> Wijaya, Tony. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu
- <sup>28</sup> Sugiyono, (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmān, 'Isā. (1996). *Al Mu'āmalāt Al Hadīсах Wa Ahkāmaha*. Cairo.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung : CV Alfabeta.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah. Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Bank Indonesia. (2008-2013). *Statistik Perbankan Syariah (Islamic Banking Statistics)*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2013). *Kajian Ekonomi Regional Provinsi Banten*. Banten.
- Badan Pusat Statistik. (2013). *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Banten*.
- Brigham dan Houston. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Buku 1. Edisi 11. Penerjemah : Ali Akbar Yulianto. Jakarta : Salemba Empat.
- Chapra, Umer M. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Cetakan Pertama. Penerjemah : Ikhwan Abidin B. Jakarta : Gema Insani Press.
- Chapra, Umer M. (2003). *Sistem Moneter Islam*. Jakarta : Gema Insani.
- Danupranata, Gita. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Deliarnov. (2003). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Edisi Revisi. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Dunya, Syauqi Ahmad. (1994). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta : Penerbit Fikahati Aneska.
- Effendi, Fawzi. (2013). Peran Bank Indonesia dalam Perbankan Syariah. <http://www.pewarta-indonesia.com/inspirasi/opini/3241-peran-bank-indonesia-dalam-mengoptimisasi->

---

perekonomian-negara-republik-indonesia-berbasis-syariah.html

- Elkan, Walter. (2000). *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Alih Bahasa : M. Arief Djamaluddin. Jakarta : Institut Ilmu Pemerintahan Press.
- Faiz, A. Ihda. (2010). *Ketahanan Kredit Perbankan Syariah Terhadap Krisis Keuangan Global*. La riba Volume 4 nomor 2-2010.
- Ghozali, Imam. (2009). *Analisis Multivariate Lanjutan Dengan Program SPSS*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Gujarati. (2006). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta.
- Hakim, Abdul. (2002). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Pertama. Yogyakarta : Ekonisia.
- Irawan dan Suparmoko, M. (2002). *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Keenam. Yogyakarta : BPFE.
- Ismail. (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Karim, Adiwarmanto. (2004). *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*. Edisi Kedua. Jakarta : Penerbit : Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : Rajawali Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Pendapatan Daerah Provinsi Banten*.
- Kuncoro, M. dan Suhardjono. (2011). *Manajemen Perbankan. Teori dan Aplikasi*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta : BPFE.
- Kuncoro, Mudrajad. (2013). *Indikator Ekonomi*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- \_\_\_\_\_. (2004). *Metode Kuantitatif. Teori dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Nachrowi, Djalal. N dan Hardius Usman. (2002). *Penggunaan Teknik Ekonometri. (Pendekatan Populer & Praktis*

---

*Dilengkapi Teknik Analisis & Pengolahan Data dengan Menggunakan Paket Program SPSS*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

- Nugroho, Bhuono Agung. (2005). *Strategi Jitu (Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta : Andi.
- Pindyck, R.S. dan Rubinfeld, D.L. (2007). *Mikroekonomi*. Edisi Keenam. Jilid 1. Alih Bahasa : Nina Kurnia Dewi. Jakarta : PT. Indeks.
- Republik Indonesia. (2013). *Data dan Informasi Kinerja Pembangunan Ekonomi Tahun 2004-2012*. Indonesia.
- Reeve, J.M., et. al. (2013). *Pengantar Akuntansi. Adaptasi Indonesia*. Buku 1. Penerjemah : Damayanti Dian. Jakarta : Salemba Empat.
- Rivai, Veithzal. (2007). *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Samuelson dan Nordhaus. (2003). *Ilmu Mikro Ekonomi*. Alih Bahasa : Nur Rosyida, Anna Elly dan Bosco Carvallo. Jakarta : PT. Media Global Edukasi.
- Sholihin, A. I. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Siamat, Dahlan. (2005). *Manajemen Lembaga Keuangan. Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Edisi Kelima. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sudarsono, Heri. (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Cetakan Ketiga. Bandung : Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2010). *Makroekonomi. Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Cetakan Kesembilanbelas. Jakarta : Rajawali Pers.

- 
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soemitra, Andir. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Todaro, M. (2000). *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Terjemahan : Haris Munandar. Jilid 1. Edisi ke-6. Jakarta : Erlangga.
- Umam, Khaerul. (2013). *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2008. *Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Wijaya, Tony. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Wiratmo, Masykur. (1996). *Pengantar Kewiraswastaan. Kerangka Dasar Memasuki Dunia Bisnis*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)